



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang transparan dan akuntabel, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

8. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi;
 - b. estimasi;
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati Ponorogo dapat menyetujui Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Kepala SKPD dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;

- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program dan kegiatan di SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008~~

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 102 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK STANDAR BIAYA HONORARIUM, STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT,
STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR,
STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN STANDAR BIAYA TRANSPORT KEGIATAN**

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

1.1.1 KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

1.1.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

1.1.3 PPK-SKPD/PPTK;

1.1.4 Bendahara Pengeluaran;

1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu;

1.1.6 Bendahara Penerimaan;

1.1.7 Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola dikurangi belanja gaji pegawai di SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Honorarium PPTK berdasarkan jumlah pagu belanja yang dikelola di bidang PPTK tersebut;
- b) Bendahara Pengeluaran yang telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.1

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TINGKAT SKPD | | |
| | 1.1.1 KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 400.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar | O/B | 600.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar | O/B | 700.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar | O/B | 800.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar | O/B | 900.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar | O/B | 1.000.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar | O/B | 1.200.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas 100 milyar | O/B | 1.300.000,00 |
| | 1.1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 400.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 750 juta | O/B | 500.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas 750 juta sampai dengan 1 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar | O/B | 600.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar | O/B | 700.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar | O/B | 800.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|-----------------|
| | g. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar | O/B | 900.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar | O/B | 1.000.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar | O/B | 1.200.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas 100 milyar | O/B | 1.300.000,00 |
| | 1.1.3 PPK-SKPD / PPTK : | | |
| | a. PPK Pembantu di Kelurahan | O/B | 300.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 350.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar | O/B | 550.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar | O/B | 650.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar | O/B | 750.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar | O/B | 850.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar | O/B | 950.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar | O/B | 1.100.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas 100 milyar | O/B | 1.300.000,00 |
| | 1.1.4 BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 250.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar | O/B | 550.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar | O/B | 650.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas 100 milyar | O/B | 750.000,00 |
| | 1.1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PENGURUS BARANG | | |
| | a. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan | O/B | 200.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 150.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar | O/B | 200.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar | O/B | 250.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas 100 milyar | O/B | 550.000,00 |
| | 1.1.6 BENDAHARA PENERIMAAN | | |
| | a. Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta rupiah | O/B | 150.000,00 |
| | b. Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta | O/B | 200.000,00 |
| | c. Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta | O/B | 250.000,00 |
| | d. Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 milyar | O/B | 300.000,00 |
| | e. Nilai pagu target pendapatan di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar | O/B | 350.000,00 |
| | f. Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 milyar s.d. 10 milyar | O/B | 400.000,00 |
| | g. Nilai pagu target pendapatan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar | O/B | 450.000,00 |
| | h. Nilai pagu target pendapatan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar | O/B | 500.000,00 |
| | i. Nilai pagu target pendapatan di atas 50 milyar | O/B | 550.000,00 |
| | 1.1.7 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | | |
| | a. Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta rupiah | O/B | 100.000,00 |
| | b. Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta | O/B | 150.000,00 |
| | c. Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta | O/B | 200.000,00 |
| | d. Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 milyar | O/B | 250.000,00 |
| | e. Nilai pagu target pendapatan di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar | O/B | 300.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|------------|
| | f. Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 milyar s.d. 10 milyar | O/B | 350.000,00 |
| | g. Nilai pagu target pendapatan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar | O/B | 400.000,00 |
| | h. Nilai pagu target pendapatan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar | O/B | 450.000,00 |
| | i. Nilai pagu target pendapatan di atas 50 milyar | O/B | 500.000,00 |

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 1.2

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.2 | HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | 1.2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | O/B | 680.000,00 |
| | 1.2.2 PANITIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | PANITIA/POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta | O/P | 680.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | O/P | 850.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar | O/P | 1.020.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar | O/P | 1.270.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar | O/P | 1.520.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar | O/P | 1.780.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar | O/P | 2.120.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar | O/P | 2.450.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar | O/P | 2.790.000,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar | O/P | 3.130.000,00 |
| | PANITIA/POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (BARANG DAN JASA LAINNYA) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta | O/P | 760.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | O/P | 760.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar | O/P | 920.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar | O/P | 1.140.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar | O/P | 1.370.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar | O/P | 1.600.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|--|---|--------|-----------------|
| | g. Nilai pagu pengadaan Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar | O/P | 1.910.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar | O/P | 2.210.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar | O/P | 2.520.000,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar | O/P | 2.820.000,00 |
| PANITIA/POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (KONSULTASI) | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta | O/P | 450.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta | O/P | 450.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | O/P | 480.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | O/P | 600.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar | O/P | 720.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar | O/P | 910.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar | O/P | 1.090.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar | O/P | 1.270.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar | O/P | 1.510.000,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar | O/P | 1.750.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar | O/P | 1.990.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar | O/P | 2.230.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar | O/P | 2.560.000,00 |
| 1.2.3 HONORARIUM UKPBJ | | | |
| | a. Kepala | O/B | 1.000.000,00 |
| | b. Sekretaris/Staf Pendukung | O/B | 750.000,00 |
| 1.2.4 PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN | | | |
| | a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di SKPD | O/B | 300.000,00 |
| | b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Kecamatan | O/B | 200.000,00 |
| | c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Kelurahan | O/B | 100.000,00 |
| PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan Rp 50 juta s.d Rp 200 juta | O/P | 250.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | O/P | 300.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar | O/P | 350.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar | O/P | 400.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar | O/P | 450.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar | O/P | 500.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar | O/P | 550.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar | O/P | 600.000,00 |

1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Honorarium Panitia

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan

kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b) narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.3.2 Honorarium moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.3.5 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.3

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.3 | HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, ROHANIAWAN DAN PANITIA | | |
| | 1.3.1 Honorarium Narasumber | | |
| | Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya | O/Jam | 1.700.000,00 |
| | Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah | O/Jam | 1.400.000,00 |
| | Pejabat Eselon II/yang disetarakan | O/Jam | 1.000.000,00 |
| | Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | O/Jam | 900.000,00 |
| | 1.3.2 Moderator | O/Kali | 700.000,00 |
| | 1.3.3 Pembawa Acara | O/Kali | 400.000,00 |
| | 1.3.4 Rohaniawan | O/Kali | 400.000,00 |
| | 1.3.5 Honorarium Panitia | | |
| | Penanggungjawab | O/Kali | 450.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/Kali | 400.000,00 |
| | Sekretaris | O/Kali | 300.000,00 |
| | Anggota | O/Kali | 300.000,00 |

1.4 Honorarium Instruktur/Pelatih/Asesor/Tenaga Ahli

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu dan bertugas mengajar sekaligus memberikan latihan dan bimbingan, seperti instruktur senam, instruktur menyanyi, menari dll.

Tabel 1.4

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1.4 | HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH/ASESOR/TENAGA AHLI | | |
| | 1. Pengajar/Instruktur yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara | O/Jam | 200.000,00 |
| | 2. Pengajar/Instruktur yang berasal dari luar SKPD penyelenggara | O/Jam | 300.000,00 |
| | 3. Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi) | O/Keg | 250.000,00 |
| | 4. Tenaga Asesor | peserta/ materi | 50.000,00 |
| | 5. Pengajar/Instruktur (berstatus Non ASN) | O/Jam | Sesuai harga pasar |

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas

tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah .
- c) Bersifat temperer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Tabel 1.5

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|--------|--------------|
| 1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN KEPALA DAERAH | | |
| | a) Pengarah | O/B | 1.500.000,00 |
| | b) Penanggungjawab | O/B | 1.250.000,00 |
| | c) Ketua | O/B | 1.000.000,00 |
| | d) Wakil Ketua | O/B | 850.000,00 |
| | e) Sekretaris | O/B | 750.000,00 |
| | f) Anggota | O/B | 750.000,00 |
| | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN SEKRETARIAT DAERAH | | |
| | a) Pengarah | O/B | 750.000,00 |
| | b) Penanggungjawab | O/B | 700.000,00 |
| | c) Ketua | O/B | 650.000,00 |
| | d) Wakil Ketua | O/B | 600.000,00 |
| | e) Sekretaris | O/B | 500.000,00 |
| | f) Anggota | O/B | 500.000,00 |
| | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | a) Ketua/Wakil Ketua | O/B | 250.000,00 |
| | b) Anggota | O/B | 220.000,00 |

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli | O/K | 1.800.000,00 |
| | Honorarium Beracara | O/K | 1.800.000,00 |

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Tabel 1.7

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| 1.7 | HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PNS | | |
| | SLTA | O/B | 2.100.000,00 |
| | D1/D2/D3/Sarjana Terapan | O/B | 2.400.000,00 |
| | Sarjana (S1) | O/B | 2.600.000,00 |
| | Master (S2) | O/B | 2.800.000,00 |
| | Doktor (S3) | O/B | 3.000.000,00 |

1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.8.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.8

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|-------------|-----------------|
| 1.8 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE | | |
| | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL | | |
| | a) Penanggungjawab | Oter | 500.000,00 |
| | b) Redaktur | Oter | 400.000,00 |
| | c) Penyunting/Editor | Oter | 300.000,00 |
| | d) Desain Grafis | Oter | 180.000,00 |
| | e) Fotografer | Oter | 180.000,00 |
| | f) Sekretariat | Oter | 150.000,00 |
| | g) Pembuat artikel | Per halaman | 200.000,00 |
| | HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH | | |
| | a) Penanggungjawab | Oter | 400.000,00 |
| | b) Redaktur | Oter | 300.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|---|----------------------|-------------|-----------------|
| | c) Penyunting/Editor | Oter | 250.000,00 |
| | d) Desain Grafis | Oter | 180.000,00 |
| | e) Fotografer | Oter | 180.000,00 |
| | f) Sekretariat | Oter | 150.000,00 |
| | g) Pembuat artikel | Per halaman | 100.000,00 |
| HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE | | | |
| | a) Penanggungjawab | O/B | 500.000,00 |
| | b) Redaktur | O/B | 450.000,00 |
| | c) Editor | O/B | 400.000,00 |
| | d) Web Admin | O/B | 350.000,00 |
| | e) Web Developer | O/B | 300.000,00 |
| | f) Pembuat artikel | Per halaman | 100.000,00 |

1.9 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang, dan;
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.9

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| 1.9 | HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT | | |
| | a) Lama Diklat s.d 5 hari | | |
| | Penanggungjawab | O/K | 450.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 400.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 300.000,00 |
| | Anggota | O/K | 300.000,00 |
| | b) Lama Diklat 6 s.d 30 hari | | |
| | Penanggungjawab | O/K | 675.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 600.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 450.000,00 |
| | Anggota | O/K | 450.000,00 |
| | c) Lama Diklat lebih dari 30 hari | | |
| | Penanggungjawab | O/K | 900.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 800.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 600.000,00 |
| | Anggota | O/K | 600.000,00 |

1.10 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.10

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|--------|-----------------|
| 1.10 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | a) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | Pembina | O/B | 3.500.000,00 |
| | Pengarah | O/B | 3.000.000,00 |
| | Ketua | O/B | 2.500.000,00 |
| | Wakil Ketua | O/B | 2.000.000,00 |
| | Sekretaris | O/B | 1.500.000,00 |
| | Anggota | O/B | 1.300.000,00 |
| | b) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | Ketua | O/B | 1.000.000,00 |
| | Sekretaris | O/B | 900.000,00 |
| | Anggota | O/B | 600.000,00 |

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagaiberikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor *fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan , dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.

Rapat-rapat, agar dilakukan secara selektif, dengan persiapan yang lebih matang sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan rapat-rapat tersebut, penyediaan hidangan/konsumsi rapat diatur sebagai berikut:

1. Rapat/pertemuan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat, boleh disediakan makanan ringan dan minuman seperlunya.
2. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
3. Rapat/pertemuan dinas yang waktu pelaksanaannya melebihi jam 12.00 WIB dapat disediakan makan siang dalam bentuk yang sederhana.
4. Besarnya biaya rapat untuk penyediaan konsumsi sebagaimana ketentuan di atas, harus diupayakan dengan sederhana dalam batas wajar hemat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan mewah/berlebihan.
5. Hal ini berlaku juga penerimaan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dalam rangka keperluan dinas.

Makan harian pegawai diberikan untuk semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Tabel 3

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|------------|--------------|
| 3. | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI | | |
| | 1. Prasmanan VVIP | Orang/Kali | 75.000,00 |
| | 2. Prasmanan VIP | Orang/Kali | 55.000,00 |
| | 3. Prasmanan Biasa | Orang/Kali | 45.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------------------|------------|-----------------|
| | 4. Nasi Kotak VIP | Orang/Kali | 35.000,00 |
| | 5. Nasi Kotak Biasa | Orang/Kali | 27.500,00 |
| | 6. Snack Kotak VVIP | Orang/Kali | 25.000,00 |
| | 7. Snack Kotak VIP | Orang/Kali | 17.500,00 |
| | 8. Snack Kotak Biasa | Orang/Kali | 12.500,00 |
| | 9. Nasi Tumpeng VVIP | Paket | 700.000,00 |
| | 10. Nasi Tumpeng | Paket | 700.000,00 |
| | 11. Makanan dan Minuman Harian | Orang/Kali | 10.000,00 |

4. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN / non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang

Penyediaan uang lembur pegawai dibatasi, hanya dalam rangka kegiatan yang tidak dapat/atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menyertakan argumentasi/alasan yang jelas terkait dilaksanakannya kegiatan lembur dimaksud

Uang makan lembur sebesar Rp 35.000,00 diperuntukan bagi semua golongan, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari untuk hari kerja dan 5 (lima) jam sehari untuk hari libur, selebihnya tidak diperhitungkan. Untuk lembur yang dikerjakan pada hari libur besaran uang lembur dapat diberikan sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja, ketentuan ini juga berlaku ke pegawai yang sistem kerjanya berdasarkan shift.

Uang lembur tidak dapat diberikan kepada seorang pegawai apabila sudah mendapat honorarium dari kegiatan berkenaan.

Tabel 4

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|--------|-----------------|
| 4. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | 1. UANG LEMBUR | | |
| | a. Golongan I/II/Non ASN | O/Jam | 17.000,00 |
| | b. Golongan III | O/Jam | 20.000,00 |
| | c. Golongan IV | O/Jam | 25.000,00 |
| | 2. UANG MAKAN LEMBUR | O/Hari | 35.000,00 |

5. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN

1. Nilai tertinggi transport kegiatan sebesar Rp. 100.000,00 per hari.
2. Penganggaran transport kegiatan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah.
3. Transport kegiatan dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Ponorogo.
4. Lampiran pertanggungjawaban transport kegiatan terdiri dari daftar hadir, tanda terima dan surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

5. Dalam hal bukti pengeluaran tidak diperoleh karena tugasnya bersifat keliling seperti survei atau monitoring, pertanggungjawaban transport kegiatan dalam kabupaten dapat menggunakan daftar pengeluaran rill yang ditandatangani PPTK kegiatan tersebut.
6. Transport kegiatan tidak dapat diberikan apabila sudah mendapatkan perjalanan dinas dalam daerah.

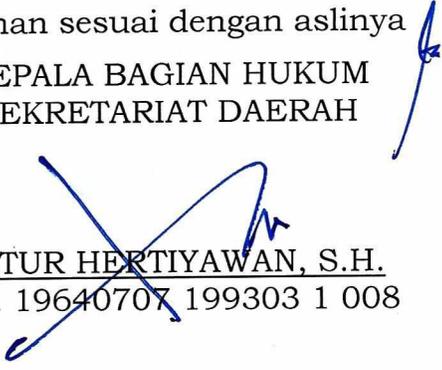
BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 102 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

SATUAN BIAYA LAINNYA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|----------------|-----------------|
| 1. | Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.510 |
| 2. | Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 4.290 |
| 3. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.120 |
| 4. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.640 |
| 5. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.250 |
| 6. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.770 |
| 7. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 2.275 |
| 8. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.185 |
| 9. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 2.080 |
| 10. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 2.080 |
| 11. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 0-450 VA | Kwh | 169 |
| 12. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 451-900 VA | Kwh | 274 |
| 13. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 901-1.300 VA | Kwh | 1.445 |
| 14. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1M/TR 451-900 VA | Kwh | 1.352 |
| 15. | Langganan Jasa Internet 5 Mbps dedicated dan manage service | Paket | 6.575.000 |
| 16. | Biaya Jasa Akseptor MOP | Paket | 500.000 |
| 17. | Biaya Jasa Akseptor MOW | Paket | 300.000 |
| 18. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) HbsAg. | Paket | 2.000.000 |
| 19. | Biaya Operasional Jasa Medis IUD/Implan | Paket | 100.000 |
| 20. | Biaya Operasional Jasa Medis MOP | Paket | 500.000 |
| 21. | Biaya Operasional Jasa Medis MOW | Paket | 5.200.000 |
| 22. | Biaya Operasional Pelayanan KB-IUD/Implan | Paket | 480.000 |
| 23. | Biaya Operasional Pelayanan KB-MOP | Paket | 1.295.000 |
| 24. | Biaya Operasional Pelayanan KB-MOW | Paket | 5.995.000 |
| 25. | Biaya Pertolongan Persalinan dengan Tindakan di Rumah Sakit | Paket | 7.500.000 |
| 26. | Biaya Pertolongan Persalinan Normal di Faskes | Paket | 700.000 |
| 27. | Biaya Rujukan Persalinan dan Neonatal Persalinan dan Neonatal | Kasus | 250.000 |
| 28. | Biaya Visum Et Biaya Visum Et Psikiatrikum | Kali | 580.000 |
| 29. | Biaya Visum Et Biaya Visum Et Repertum | Kali | 200.000 |
| 30. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Kimia Air | Paket | 2.700.000 |
| 31. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis BTA | Paket | 1.300.000 |
| 32. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Malaria | Paket | 2.000.000 |
| 33. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Telur Cacing | Paket | 1.300.000 |
| 34. | Biaya iklat Pendidikan Profesi Guru | Orang/Kegiatan | 7.500.000 |
| 35. | Biaya Kontribusi Diklat Barang/Jasa | Paket | 10.000.000 |
| 36. | Biaya Kontribusi Diklat Calon Kepala Sekolah | Orang | 1.700.000 |
| 37. | Biaya Kontribusi Diklat Calon Pengawas Sekolah | Orang | 1.500.000 |
| 38. | Biaya Kontribusi Fasilitas Kepemimpinan | Angkatan | 18.000.000 |
| 39. | Biaya Kontribusi Fasilitas Latsar | Angkatan | 10.000.000 |
| 40. | Biaya Kontribusi Latsar | Orang | 9.200.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| 41. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Orang | 22.250.000 |
| 42. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional | Orang | 30.000.000 |
| 43. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Orang | 20.000.000 |
| 44. | Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi | Orang | 2.500.000 |
| 45. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 1 | Orang | 1.000.000 |
| 46. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 2 | Orang | 1.500.000 |
| 47. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 3 | Orang | 2.000.000 |
| 48. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 4 | Orang | 2.500.000 |
| 49. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 5 | Orang | 3.000.000 |
| 50. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 6 | Orang | 3.500.000 |
| 51. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 7 | Orang | 4.000.000 |
| 52. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 8 | Orang | 4.500.000 |
| 53. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 9 | Orang | 5.000.000 |
| 54. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 10 | Orang | 5.500.000 |
| 55. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tipe 11 | Orang | 6.000.000 |
| 56. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jaringan Komputer SIAK | Orang | 5.000.000 |
| 57. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Per masyarakatan Desa | Orang | 5.000.000 |
| 58. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Orang | 5.000.000 |
| 59. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal | Orang | 5.000.000 |
| 60. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah | Orang | 4.500.000 |
| 61. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Orang | 4.000.000 |
| 62. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Orang | 4.500.000 |
| 63. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Orang | 4.500.000 |
| 64. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Orang | 4.500.000 |
| 65. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Orang | 5.000.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| 66. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah | Orang | 4.000.000 |
| 67. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Orang | 5.000.000 |
| 68. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang | 4.000.000 |
| 69. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan | Orang | 4.000.000 |
| 70. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan | Orang | 4.500.000 |
| 71. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Retribusi Daerah | Orang | 4.000.000 |
| 72. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Retribusi Daerah | Orang | 5.000.000 |
| 73. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Orang | 3.500.000 |
| 74. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Bidang Kesehatan Tipe 1 | Orang | 1.000.000 |
| 75. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Bidang Kesehatan Tipe 2 | Orang | 2.500.000 |
| 76. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Bidang Kesehatan Tipe 3 | Orang | 3.500.000 |
| 77. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Bidang Kesehatan Tipe 4 | Orang | 4.000.000 |
| 78. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Bidang Kesehatan Tipe 5 | Orang | 4.500.000 |
| 79. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pangan DFI dan PKP Bidang Kesehatan | Orang | 5.000.000 |
| 80. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Daerah Tipe 1 | Orang | 1.000.000 |
| 81. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Daerah Tipe 2 | Orang | 2.000.000 |
| 82. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Daerah Tipe 3 | Orang | 5.000.000 |
| 83. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe 1 | Orang | 1.000.000 |
| 84. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe 2 | Orang | 2.500.000 |
| 85. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe 3 | Orang | 3.000.000 |
| 86. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe 4 | Orang | 5.000.000 |
| 87. | Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS | Orang | 9.200.000 |
| 88. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Orang | 22.250.000 |
| 89. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional | Orang | 30.000.000 |
| 90. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Orang | 20.000.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|------------------|-----------------|
| 91. | Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi | Orang | 2.500.000 |
| 92. | Biaya Petugas Haji Daerah (PHD) | Orang/Kali/Tahun | 50.000.000 |
| 93. | Biaya Seleksi dan Uji Kompetensi JPTP | Orang/Kegiatan | 10.000.000 |
| | HADIAH UANG DALAM LOMBA KEJUARAAN | | |
| 94. | Juara 1 Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 3.000.000 |
| 95. | Juara 2 Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 2.500.000 |
| 96. | Juara 3 Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 2.000.000 |
| 97. | Juara 1 Lumbung Pangan Masyarakat Tk. Kabupaten | Rupiah | 4.000.000 |
| 98. | Juara 2 Lumbung Pangan Masyarakat Tk. Kabupaten | Rupiah | 3.000.000 |
| 99. | Juara 3 Lumbung Pangan Masyarakat Tk. Kabupaten | Rupiah | 2.000.000 |
| 100. | Juara 1 Lomba FLS2N, KOSN, KSN Tingkat SMP | Rupiah | 1.500.000 |
| 101. | Juara 2 Lomba FLS2N, KOSN, KSN Tingkat SMP | Rupiah | 1.250.000 |
| 102. | Juara 3 Lomba FLS2N, KOSN, KSN Tingkat SMP | Rupiah | 1.000.000 |
| 103. | Juara Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 5.000.000 |
| 104. | Juara 1 Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 30.000.000 |
| 105. | Juara 2 Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 20.000.000 |
| 106. | Juara 3 Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 15.000.000 |
| 107. | Juara 4 Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 10.000.000 |
| 108. | Juara 1 Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 2.500.000 |
| 109. | Juara 2 Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 1.750.000 |
| 110. | Juara 3 Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 1.500.000 |
| 111. | Juara 1 Lomba Bercerita | Rupiah | 1.000.000 |
| 112. | Juara 2 Lomba Bercerita | Rupiah | 750.000 |
| 113. | Juara 3 Lomba Bercerita | Rupiah | 500.000 |
| 114. | Juara Harapan 1 Lomba Bercerita | Rupiah | 300.000 |
| 115. | Juara Harapan 2 Lomba Bercerita | Rupiah | 200.000 |
| 116. | Juara Harapan 3 Lomba Bercerita | Rupiah | 100.000 |
| 117. | Juara Umum Lomba Duta Genre DPPKB | Orang | 800.000 |
| 118. | Juara Wakil 1 Lomba Duta Genre DPPKB | Orang | 700.000 |
| 119. | Juara Wakil 2 Lomba Duta Genre DPPKB | Orang | 600.000 |
| 120. | Juara Wakil 3 Lomba Duta Genre DPPKB | Orang | 500.000 |
| 121. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku 0 s.d Rp. 1.000.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 122. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku 0 s.d Rp. 1.000.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 123. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku 0 s.d Rp. 1.000.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 124. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.000.000.001,00 s.d Rp. 1.400.000.000,00 | Rupiah | 1.300.000 |
| 125. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.000.000.001,00 s.d Rp. 1.400.000.000,00 | Rupiah | 1.200.000 |
| 126. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.000.000.001,00 s.d Rp. 1.400.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 127. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.400.000.001,00 s.d Rp. 1.900.000.000,00 | Rupiah | 1.600.000 |
| 128. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.400.000.001,00 s.d Rp. 1.900.000.000,00 | Rupiah | 1.500.000 |
| 129. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.400.000.001,00 s.d Rp. 1.900.000.000,00 | Rupiah | 1.400.000 |
| 130. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.900.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.900.000 |
| 131. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.900.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.800.000 |
| 132. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku Rp. 1.900.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.700.000 |
| 133. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|--------|-----------------|
| 134. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 800.000 |
| 135. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 700.000 |
| 136. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 600.000 |
| 137. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 550.000 |
| 138. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 500.000 |
| 139. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 140. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 141. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 800.000 |
| 142. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 700.000 |
| 143. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 650.000 |
| 144. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 600.000 |
| 145. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 146. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 147. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 148. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 800.000 |
| 149. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 750.000 |
| 150. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 700.000 |
| 151. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 1.200.000 |
| 152. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 153. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 154. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 155. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 850.000 |
| 156. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 800.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|-------------|-----------------|
| 157. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 1.300.000 |
| 158. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 1.200.000 |
| 159. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 160. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 161. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 950.000 |
| 162. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 163. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 1.400.000 |
| 164. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 1.300.000 |
| 165. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000 |
| 166. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000 |
| 167. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 950.000 |
| 168. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 900.000 |
| 169. | Juara 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.500.000 |
| 170. | Juara 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.400.000 |
| 171. | Juara 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.300.000 |
| 172. | Juara Harapan 1 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.200.000 |
| 173. | Juara Harapan 2 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.150.000 |
| 174. | Juara Harapan 3 Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.100.000 |
| | GAJI/UPAH TENAGA ATAU JASA | | |
| 175. | GTT/PTT sisa K2 | Orang/Bulan | 1.000.000 |
| 176. | Tunjangan GTT/PTT Non K2 (Lembaga) | Orang/Bulan | 250.000 |
| 177. | GTT/PTT sisa K2 | Orang/Bulan | 500.000 |
| 178. | GTT/PTT yang sudah mendapatkan tunjangan profesi | Orang/Bulan | 700.000 |
| 179. | Jasa Pendataan Obyek Pajak Bangunan | Orang/Titik | 20.000 |
| 180. | Jasa Pendataan Obyek Pajak PBB | Orang/Titik | 15.000 |
| 181. | Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes (Sharing) | Orang/Bulan | 463.322 |
| 182. | Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes | Orang/Bulan | 1.913.322 |
| 183. | Jasa Tenaga Kesehatan (BOK) | Orang/Bulan | 1.913.322 |
| 184. | Jasa Pemeliharaan Tanah | Orang/Kali | 300.000 |
| 185. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 1 | Orang/Kali | 3.800.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|------------|-----------------|
| 186. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 2 | Orang/Kali | 3.000.000 |
| 187. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 3 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 188. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 1 | Orang/Kali | 4.000.000 |
| 189. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 2 | Orang/Kali | 3.250.000 |
| 190. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 3 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 191. | Jasa Tenaga Fasilitator Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Orang/Kali | 3.000.000 |
| 192. | Jasa Tenaga Kesehatan | Orang/Kali | 1.450.000 |
| 193. | Jasa Tenaga Kesehatan (Tenaga Dokter Daerah Spesifik) | Orang/Kali | 4.000.000 |
| 194. | Jasa Tenaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Orang/Kali | 4.000.000 |
| 195. | Jasa Tenaga Ahli Bidang Kesenian dan Kebudayaan | Orang/Kali | 4.000.000 |
| 196. | Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Umum | Orang/Kali | 3.500.000 |
| 197. | Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Gigi | Orang/Kali | 3.500.000 |
| 198. | Jasa Tenaga Kesehatan – Tenaga Apoteker | Orang/Kali | 2.500.000 |
| 199. | Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Pengairan | Orang/Kali | 2.500.000 |
| 200. | Jasa Tenaga Ahli SDM Kebudayaan dan Pariwisata | Orang/Kali | 2.500.000 |
| 201. | Jasa Tenaga Pengembangan Teknologi Informasi | Orang/Kali | 2.500.000 |
| 202. | Jasa Tenaga Kesehatan – Pendidikan dan Pelatihan | Orang/Kali | 1.150.000 |
| 203. | Jasa Tenaga Operator Komputer | Orang/Kali | 3.000.000 |
| 204. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 1 | Orang/Kali | 750.000 |
| 205. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 2 | Orang/Kali | 800.000 |
| 206. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 3 | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 207. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 4 | Orang/Kali | 1.100.000 |
| 208. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 5 | Orang/Kali | 1.200.000 |
| 209. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 6 | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 210. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 7 | Orang/Kali | 1.300.000 |
| 211. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 8 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 212. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 9 | Orang/Kali | 1.600.000 |
| 213. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 10 | Orang/Kali | 1.700.000 |
| 214. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 11 | Orang/Kali | 1.750.000 |
| 215. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 12 | Orang/Kali | 1.800.000 |
| 216. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 13 | Orang/Kali | 1.850.000 |
| 217. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 14 | Orang/Kali | 1.900.000 |
| 218. | Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Umum) Tipe 15 | Orang/Kali | 2.000.000 |
| 219. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 1 | Orang/Kali | 750.000 |
| 220. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 2 | Orang/Kali | 800.000 |
| 221. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 3 | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 222. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 4 | Orang/Kali | 1.100.000 |
| 223. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 5 | Orang/Kali | 1.200.000 |
| 224. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 6 | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 225. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 7 | Orang/Kali | 1.300.000 |
| 226. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 8 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 227. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 9 | Orang/Kali | 1.600.000 |
| 228. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 10 | Orang/Kali | 1.700.000 |
| 229. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 11 | Orang/Kali | 1.750.000 |
| 230. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 12 | Orang/Kali | 1.800.000 |
| 231. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 13 | Orang/Kali | 1.850.000 |
| 232. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 14 | Orang/Kali | 1.900.000 |
| 233. | Jasa Tenaga Kebersihan Tipe 15 | Orang/Kali | 2.000.000 |
| 234. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 1 | Orang/Kali | 750.000 |
| 235. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 2 | Orang/Kali | 800.000 |
| 236. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 3 | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 237. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 4 | Orang/Kali | 1.100.000 |
| 238. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 5 | Orang/Kali | 1.200.000 |
| 239. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 6 | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 240. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 7 | Orang/Kali | 1.300.000 |
| 241. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 8 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 242. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 9 | Orang/Kali | 1.600.000 |
| 243. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 10 | Orang/Kali | 1.700.000 |
| 244. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 11 | Orang/Kali | 1.750.000 |
| 245. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 12 | Orang/Kali | 1.800.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|----------------|-----------------|
| 246. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 13 | Orang/Kali | 1.850.000 |
| 247. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 14 | Orang/Kali | 1.900.000 |
| 248. | Jasa Tenaga Keamanan Tipe 15 | Orang/Kali | 2.000.000 |
| 249. | Jasa Operator Komputer Tipe 1 | Orang/Kali | 750.000 |
| 250. | Jasa Operator Komputer Tipe 2 | Orang/Kali | 800.000 |
| 251. | Jasa Operator Komputer Tipe 3 | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 252. | Jasa Operator Komputer Tipe 4 | Orang/Kali | 1.100.000 |
| 253. | Jasa Operator Komputer Tipe 5 | Orang/Kali | 1.200.000 |
| 254. | Jasa Operator Komputer Tipe 6 | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 255. | Jasa Operator Komputer Tipe 7 | Orang/Kali | 1.300.000 |
| 256. | Jasa Operator Komputer Tipe 8 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 257. | Jasa Operator Komputer Tipe 9 | Orang/Kali | 1.600.000 |
| 258. | Jasa Operator Komputer Tipe 10 | Orang/Kali | 1.700.000 |
| 259. | Jasa Operator Komputer Tipe 11 | Orang/Kali | 1.750.000 |
| 260. | Jasa Operator Komputer Tipe 12 | Orang/Kali | 1.800.000 |
| 261. | Jasa Operator Komputer Tipe 13 | Orang/Kali | 1.850.000 |
| 262. | Jasa Operator Komputer Tipe 14 | Orang/Kali | 1.900.000 |
| 263. | Jasa Operator Komputer Tipe 15 | Orang/Kali | 2.000.000 |
| 264. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 1 | Orang/Kali | 750.000 |
| 265. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 2 | Orang/Kali | 800.000 |
| 266. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 3 | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 267. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 4 | Orang/Kali | 1.100.000 |
| 268. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 5 | Orang/Kali | 1.200.000 |
| 269. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 6 | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 270. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 7 | Orang/Kali | 1.300.000 |
| 271. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 8 | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 272. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 9 | Orang/Kali | 1.600.000 |
| 273. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 10 | Orang/Kali | 1.700.000 |
| 274. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 11 | Orang/Kali | 1.750.000 |
| 275. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 12 | Orang/Kali | 1.800.000 |
| 276. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 13 | Orang/Kali | 1.850.000 |
| 277. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 14 | Orang/Kali | 1.900.000 |
| 278. | Jasa Tenaga Pengemudi Tipe 15 | Orang/Kali | 2.000.000 |
| 279. | Upah Pekerja | Rupiah | 75.000 |
| 280. | Jasa Juri Perlombaan, Bakat dan Minat Siswa | Orang/Kegiatan | 300.000 |
| 281. | Jasa Ketua RT/RW, Pemuka Masyarakat | Rupiah | 200.000 |
| 282. | Jasa Pemuka Masyarakat | Rupiah | 300.000 |
| 283. | Jasa untuk Pemuka Masyarakat/Modin | Orang/Bulan | 500.000 |
| 284. | Jasa Konsultasi Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Layanan Lumpur Tinja Terjadwal | Paket | 49.000.000 |
| 285. | Jasa Konsultasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Kecamatan | 50.000.000 |
| 286. | Jasa Konsultasi Pendampingan Penyusunan Penetapan Status BMD | Paket | 25.000.000 |
| 287. | Jasa Konsultasi Pendampingan Review Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten | Paket | 50.000.000 |
| 288. | Jasa Konsultasi Penyusunan Roadmap Pengembangan Pendapatan Retribusi | Paket | 78.000.000 |
| 289. | Jasa Konsultasi Penyusunan Roadmap Pengembangan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha | Paket | 78.000.000 |
| 290. | Jasa Konsultasi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) | Paket | 100.000.000 |
| 291. | Jasa Konsultasi RTRW | Paket | 500.000.000 |
| 292. | Jasa Konsultasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPERWIRO) | Paket | 50.000.000 |
| 293. | Jasa Konsultasi Pendampingan PPDB Online | Paket | 50.000.000 |
| 294. | Jasa Konsultasi Penelitian Appraisal Penghapusan BMD | Paket | 67.734.050 |
| 295. | Jasa Pemeliharaan Peralatan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Paket | 100.000.000 |
| 296. | Jasa Penyusunan Naskah Akademis | Paket | 100.000.000 |
| 297. | Jasa Penyusunan RAPERDA | Paket | 100.000.000 |
| 298. | Jasa Penyusunan Standar Operasional Pelayanan PDRB | Paket | 85.000.000 |
| 299. | Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (khusus Pimpinan Daerah) | Semester | 125.000.000 |
| 300. | Jasa Verifikasi Piutang Pajak Daerah | Orang/Titik | 25.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|----------------|-----------------|
| 301. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepala Daerah | Orang/Bulan | 30.000.000 |
| 302. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Wakil Kepala Daerah | Orang/Bulan | 20.000.000 |
| 303. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kapolres | Orang/Bulan | 15.000.000 |
| 304. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepala Kejaksaan Negeri | Orang/Bulan | 15.000.000 |
| 305. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ketua Pengadilan Negeri | Orang/Bulan | 15.000.000 |
| 306. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Komandan Kodim | Orang/Bulan | 15.000.000 |
| 307. | Honorarium Narasumber Mubaligh Kelas 1 | Paket | 30.000.000 |
| 308. | Honorarium Narasumber Mubaligh Kelas 2 | Paket | 20.000.000 |
| 309. | Honorarium Narasumber Mubaligh Kelas 3 | Paket | 10.000.000 |
| 310. | Honorarium Narasumber Mubaligh Kelas 4 | Paket | 5.000.000 |
| 311. | Honorarium Narasumber Mubaligh Kelas 5 | Paket | 2.500.000 |
| 312. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/Tenaga Ahli untuk Pengajar yang berasal dari dalam SKPD | Orang/Jam | 200.000 |
| 313. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/Tenaga Ahli untuk Pengajar yang berasal dari luar SKPD | Orang/Jam | 200.000 |
| 314. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/Tenaga Ahli untuk Pengajar yang berasal dari Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi) | Orang/Kegiatan | 250.000 |
| 315. | Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan dan Barang Daerah | Orang/Bulan | 65.000.000 |
| 316. | Honorarium Wakil Pemegang Kekuasaan Keuangan dan Barang Daerah | Orang/Bulan | 43.000.000 |
| 317. | Honorarium Tim Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Juknis DAK Kesehatan | Rupiah | 450.000 |
| 318. | Pakaian Kerja Lapangan KDH-WKDH Bahan dan Ongkos Jahit | Paket | 3.000.000 |
| 319. | Inventaris Kantor | Pegawai/tahun | 80.000 |
| 320. | Pemeliharaan AC Split | Unit/Tahun | 610.000 |
| 321. | Pemeliharaan Peralatan Musik Pengiring Upacara, Cleaning Berkala, Pelumasan dan Penggantian Ringan Part | Semester | 2.000.000 |
| 322. | Pemeliharaan Personal Computer/Notebook | Unit/Tahun | 730.000 |
| 323. | Pemeliharaan Printer | Unit/Tahun | 690.000 |
| 324. | Pemeliharaan Rutin Elevator/Lift, Service Rutin Tanpa Ganti Spare Part | Bulan | 3.000.000 |
| 325. | Pemeliharaan Genset 100 KVA | Unit/Tahun | 10.150.000 |
| 326. | Pemeliharaan Genset 125 KVA | Unit/Tahun | 10.780.000 |
| 327. | Pemeliharaan Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 13.260.000 |
| 328. | Pemeliharaan Genset 175 KVA | Unit/Tahun | 14.810.000 |
| 329. | Pemeliharaan Genset 200 KVA | Unit/Tahun | 15.850.000 |
| 330. | Pemeliharaan Genset 250 KVA | Unit/Tahun | 16.790.000 |
| 331. | Pemeliharaan Genset 275 KVA | Unit/Tahun | 17.760.000 |
| 332. | Pemeliharaan Genset 300 KVA | Unit/Tahun | 20.960.000 |
| 333. | Pemeliharaan Genset 350 KVA | Unit/Tahun | 22.960.000 |
| 334. | Pemeliharaan Genset 450 KVA | Unit/Tahun | 25.620.000 |
| 335. | Pemeliharaan Genset 500 KVA | Unit/Tahun | 31.770.000 |
| 336. | Pemeliharaan Genset 75 KVA | Unit/Tahun | 8.640.000 |
| 337. | Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 7.190.000 |
| 338. | Premi Asuransi Kecelakaan (Pengunjung Tempat Wisata) | Orang | 250 |
| 339. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Promotor Kesehatan | Orang/Bulan | 76.533 |
| 340. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1 | Orang/Bulan | 140.000 |
| 341. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2 | Orang/Bulan | 160.000 |
| 342. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1 | Orang/Bulan | 10.715 |
| 343. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2 | Orang/Bulan | 18.900 |
| 344. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 3 | Orang/Bulan | 21.600 |

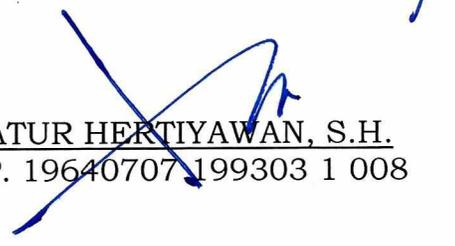
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|-------------|-----------------|
| 345. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 4 | Orang/Bulan | 13.500 |
| 346. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 5 | Orang/Bulan | 10.322 |
| 347. | Premi BPJS untuk Kepala Desa | Orang/Bulan | 176.800 |
| 348. | Premi BPJS untuk Perangkat Desa | Orang/Bulan | 89.900 |
| 349. | Premi BPJS untuk Sekretaris Desa | Orang/Bulan | 104.800 |
| 350. | Premi BPJS untuk Staf Desa | Orang/Bulan | 85.900 |
| 351. | Premi BPJS untuk PBID | Bulan | 1.289.659.062 |
| 352. | Biaya Rapid Test | Orang/Kali | 150.000 |
| 353. | Sewa Kereta Hias | Paket | 30.000.000 |
| 354. | Sewa Mobil Hias | Paket | 40.000.000 |

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707199303 1 008